

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Konflik dalam organisasi adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali partai politik yang menjadi wadah dari berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat. Dalam menyikapi konflik yang terjadi di dalam partai, para pengurus partai harus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang terjadi di internal partai agar nantinya mampu memanaajemen konflik yang terjadi, sehingga konflik tersebut mampu ditransformasikan menjadi hal yang positif bagi partai, atau setidaknya mencegah konflik yang terjadi di partai menjadi konflik yang bisa berdampak negatif bagi kepengurusan partai, dalam hal ini DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

Konflik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus berasal dari dua, yaitu internal DPD sendiri dan konflik di DPP yang berdampak ke DPD. Dua macam konflik ini teridentifikasi menjadi beberapa bentuk konflik. Bentuk konflik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus adalah bentuk konflik menurut Lewis Coser yaitu konflik realistik dan non-realistik, yaitu ketidaksepahaman dalam mencapai tujuan partai ini masih terkait dengan kinerja partai dalam Pemilu. Ketidaksepahaman ini muncul karena kadangkala strategi yang dijalankan partai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di daerah pemilihan. Kader yang berasal dari daerah pemilihan tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan terkait cara partai menjalankan strategi Pemilu. Konflik non-realistik di DPD Partai Keadilan Kabupaten Kudus tidak terlihat karena rasa persaudaraan atau *ukhuwah* antar kader yang tinggi sanggup meminimalisir konflik non-realistik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera.

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus menurut Ruchyat yaitu konflik interpersonal konflik interpersonal, individu di dalam kepengurusan partai berkonflik dengan individu lainnya terlepas dari status dan jabatannya di partai. Sedangkan dalam konflik intra kelompok, pihak yang berkonflik adalah kelompok-kelompok di dalam partai. Kelompok-kelompok ini umumnya berupa pendukung loyal elit partai yang menciptakan kubu-kubu di dalam kepengurusan partai.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, selanjutnya yaitu memahami manajemen konflik yang pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus gunakan. Teori manajemen konflik yang DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus gunakan yaitu teori transformasi konflik dan teori penanganan konflik Fisher, dkk. Dalam teori transformasi konflik, partai menyelesaikan konflik secara bertahap yaitu dengan pencegahan, penyelesaian dan pengelolaan konflik. Pencegahan konflik dilakukan dengan sistem kaderisasi yang kuat. Penyelesaian konflik ditempuh dengan cara *ishlah*. Kemudian pengelolaan konflik ditempuh dengan cara mendorong para kader agar selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan jika terjadi konflik antar kader. Dalam teori penanganan konflik, partai menempuh manajemen konflik dengan cara mengurangi konflik, yaitu dengan cara mendinginkan situasi, lalu menyelesaikan konflik dengan cara dominasi.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta penerapan ilmu dalam metode penelitian (*contribution of knowledge*) dalam bidang politik, sehingga dapat mengubah stigma terkait partai politik Islam yang sering sekali mengalami konflik internal.
2. Memberikan pemahaman terkait pengelolaan partai, terutama dalam manajemen konflik yang terjadi di partai; bahwa konflik akan selalu terjadi di dalam partai, dan bagaimana cara agar konflik yang terjadi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai hal positif.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam penelitian terkait konflik yang mengitari partai, terutama mengenai konflik internal yang terjadi antar anggota partai. Pendalaman penelitian ini bisa berupa sumber dari pihak ketiga, mengingat partai yang cenderung tertutup mengenai pembahasan terkait konflik yang dialami partai.
4. Bagi partai politik agar tidak terlalu larut ke dalam konflik dan tetap fokus menjalankan fungsi partai politik. Stigma buruk terhadap partai politik muncul di masyarakat karena partai yang seharusnya sebagai sarana pengatur konflik malah berlarut-larut dalam konflik yang terjadi dalam internal partai.